



# SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE :  
www.dpr.go.id

---

Nomor : 581/PI.03.02/IX/2023 Jakarta, 08 September 2023  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Internal atas  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 di Biro  
Pemberitaan Parlemen

Yth. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen  
Sekretariat Jenderal DPR RI

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur II Nomor: 269/PI.03.02/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, dengan hormat Kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 di Biro Pemberitaan Parlemen dengan uraian sebagai berikut:

## 1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2643/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI, maka Inspektorat II telah melakukan Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja di Biro Pemberitaan Parlemen Tahun 2023.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja di Biro Pemberitaan Parlemen dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Khususnya bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Evaluasi SAKIP merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja instansi pemerintah/unit kerja yang dilaksanakan untuk mendorong unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Ruang lingkup evaluasi internal adalah melakukan penilaian atas:

- a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.

- c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja yang dapat memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
- e. Capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Pelaksanaan evaluasi internal di Biro Pemberitaan Parlemen menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif berdasarkan peraturan, disesuaikan dengan tujuan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

## 2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja di Biro Pemberitaan Parlemen Tahun 2023 menunjukkan nilai **“60.90”** dengan predikat **“B”**. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
			2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	<b>22,80</b>
2.	Pengukuran Kinerja	30	<b>20,70</b>
3.	Pelaporan Kinerja	15	<b>9,90</b>
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	<b>7,50</b>
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>60,90</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>B</b>

**Kami sungguh mengapresiasi penilaian akuntabilitas kinerja di Biro Pemberitaan Parlemen Tahun 2023, sedangkan pada tahun 2022 belum dilakukan penilaian atau evaluasi AKIP.** Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja pada Biro Pemberitaan Parlemen Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### a. Perencanaan Kinerja

Secara keseluruhan ukuran keberhasilan yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Biro Pemberitaan Parlemen telah memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time based* (SMART). Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di Deputi Bidang Persidangan telah disusun selaras, perencanaan kinerja juga telah dirumuskan dan ditetapkan hingga ke level pegawai melalui Sistem Kinerja Pegawai (SKP). SKP telah mendukung kinerja yang ingin dicapai dalam Perjanjian Kinerja **Biro Pemberitaan Parlemen**. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan serta aktivitas, namun belum sepenuhnya terlihat secara *crosscutting*.

Kegiatan dalam perencanaan kinerja telah sesuai dengan perencanaan pengajuan anggaran, atas perencanaan tersebut juga telah dilakukan pemantauan. Sekretaris Jenderal DPR RI menyampaikan laporan realisasi anggaran dan capaian kinerja dalam forum Rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT DPR RI).

**Selain itu, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, sebagai berikut:**

- 1) Rencana Aksi Biro Pemberitaan Parlemen Tahun 2023 belum diunggah pada *website rb.dpr.go.id*.
- 2) Terdapat indikator kinerja Biro Pemberitaan Parlemen yang tidak selaras dengan Indikator Kinerja Deputy Bidang Persidangan (Perjanjian Kinerja dan Renstra), yakni indikator kinerja "Persentase Realisasi Anggaran Biro Pemberitaan Parlemen."
- 3) Terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak menantang karena capaian kinerja pada tahun 2022 sudah melebihi target pada tahun 2023, yakni:
  - a. Jumlah Penonton/Pendengar terhadap Program Tayangan/Siaran TVR Parlemen dalam Mensosialisasikan Kegiatan DPR RI.
  - b. Tingkat Kecepatan Penayangan Berita di Website DPR RI.
  - c. Persentase Realisasi Anggaran Biro Pemberitaan Parlemen.
  - d. Jumlah *viewers* Media Sosial DPR RI dan Media Kerjasama *Online*.
- 4) Belum dilakukan rewiu Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya.

#### **b. Pengukuran Kinerja**

Biro Pemberitaan Parlemen telah melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang sampai ke tingkat individu. Reviu anggaran sudah dilaksanakan berdasarkan pengukuran capaian kinerja dan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Namun demikian, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan terkait pengukuran kinerja, yaitu:

- 1) Telah dilakukan pengukuran kinerja berupa monitoring dan evaluasi secara periodik setiap triwulan namun belum setiap bulan.
- 2) Belum dilakukan rewiu Rencana Aksi (Renaksi) Biro Pemberitaan Parlemen.

#### **c. Pelaporan Kinerja**

Biro Pemberitaan Parlemen telah menyusun laporan kinerja, telah direviu oleh APIP, dan secara keseluruhan kualitas laporan kinerja telah disusun dengan baik sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI. Namun demikian, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan terkait pelaporan kinerja, yaitu:

- 1) Belum terdapat informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada dokumen Laporan Kinerja Biro Pemberitaan Parlemen.
- 2) Laporan kinerja juga belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- 3) Laporan Kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja) atau penjelasan terkait alasan tidak dapat mencantumkan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja).

- 4) Laporan kinerja belum menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- 5) Belum terdapat Komitmen Pelayanan atau Maklumat Standar Pelayanan Biro Pemberitaan Parlemen.

**d. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Internal, hasil evaluasi internal tahun sebelumnya belum seluruhnya dijadikan dasar sebagai perbaikan kinerja di Biro Pemberitaan Parlemen, yaitu:

Biro Pemberitaan Parlemen belum melaksanakan evaluasi atas AKIP pada tahun sebelumnya.

**3. Rekomendasi**

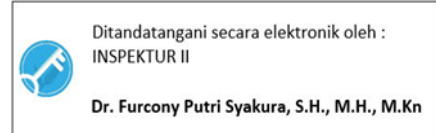
Berdasarkan uraian di atas, Kami merekomendasikan kepada di Biro Pemberitaan Parlemen adalah sebagai berikut:

- a. Mengunggah Rencana Aksi Biro Pemberitaan Parlemen Tahun 2023 di *website dpr.go.id*.
- b. Melakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja "Persentase Realisasi Anggaran Biro Pemberitaan Parlemen" agar selaras dengan indikator kinerja Eselon I.
- c. Menyesuaikan target pada indikator perjanjian kinerja dengan memerhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Jumlah Penonton/Pendengar terhadap Program Tayangan/Siaran TVR Parlemen dalam Mensosialisasikan Kegiatan DPR RI.
  - 2) Tingkat Kecepatan Penayangan Berita di *Website* DPR RI.
  - 3) Persentase Realisasi Anggaran Biro Pemberitaan Parlemen.
  - 4) Jumlah *viewers* Media Sosial DPR RI dan Media Kerjasama *Online*.
- d. Melakukan reuiu RAB berdasarkan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya.
- e. Melakukan pengukuran kinerja berupa Monitoring dan Evaluasi Renaksi secara periodik setiap bulan.
- f. Melakukan reuiu terhadap Renaksi Biro Pemberitaan Parlemen berdasarkan pengukuran capaian kinerja dan mendokumentasikannya.
- g. Mencantumkan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Laporan Kinerja Biro Pemberitaan Parlemen
- h. Mencantumkan perbandingan realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya pada Laporan Kinerja Biro Pemberitaan Parlemen.
- i. Mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional (*Benchmark* Kinerja) atau penjelasan terkait alasan tidak dapat mencantumkan realiasi kinerja di level nasional pada Laporan Kinerja Biro Pemberitaan Parlemen.
- j. Mencantumkan penjelasan terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dalam LKj Biro Pemberitaan Parlemen.

k. Menyusun Maklumat Standar Pelayanan atau Komitmen Pelayanan Biro Pemberitaan Parlemen.

Demikian disampaikan hasil evaluasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami sangat menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Biro Pemberitaan Parlemen. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 08 September 2023



Tembusan:

1. Plh. Inspektur Utama;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.  
Sekretariat Jenderal DPR RI